



## **Keterlibatan RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) dalam Penanggulangan Konflik di Kepulauan Solomon**

Falhan Hakiki

Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia; falhan19001@mail.unpad.ac.id

Deasy Silvy Sari

Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia; deasy.silvy@unpad.ac.id

Dikirim: 10 Mei 2020

Direvisi: 4 September  
2020

Diterima: 25 September  
2020

Dipublikasikan: 30 September  
2020

### **Keywords**

*Conflict, Human Security, Solomon Islands, RAMSI, Responsibility to Protect*

### **ABSTRACT**

*Internal conflicts in the Solomon Islands resulted in a humanitarian crisis that impacted on the threat to human security of Solomon Islands people. This was responded by states in the Pacific region to overcome conflicts by forming RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands). By using qualitative research methods and conceptual frameworks of non-traditional security, human security, and the responsibility to protect, in this article that RAMSI's role in dealing with conflict in the Solomon Islands takes three forms. First, the responsibility to prevent are RAMSI intervening and stabilizing. Second, the responsibility to react are RAMSI taking a series of actions such as confiscating the weapons of conflicting groups, chasing criminal and corrupt figures, and enforcing the law. Third, responsibility to rebuild are RAMSI carrying out capacity building in the fields of law, politics, security, economy in the Solomon Islands.*

### **Kata Kunci**

Keamanan Manusia, Kepulauan Solomon, Konflik, RAMSI, Tanggung Jawab Untuk Melindungi

### **ABSTRAK**

Konflik internal pada Kepulauan Solomon mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan yang berdampak kepada terancamnya keamanan manusia masyarakat negara tersebut. Hal ini di respons oleh negara-negara di kawasan Pasifik untuk menanggulangi konflik dengan membentuk RAMSI (*Regional Assistance Mission to Solomon Islands*). Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan kerangka konseptual keamanan nontradisional, keamanan manusia, dan tanggung jawab untuk melindungi, pada artikel ini didapatkan peran RAMSI dalam menanggulangi konflik di Kepulauan Solomon ada tiga bentuk. Pertama, tanggung jawab untuk mencegah yaitu RAMSI

melakukan intervensi dan stabilisasi. Kedua, tanggung jawab untuk bereaksi yaitu RAMSI melakukan serangkaian aksi seperti penyitaan senjata kelompok yang berkonflik, mengejar tokoh-tokoh kriminal dan korup, serta melakukan penegakkan hukum. Ketiga, tanggung jawab untuk pemulihan yaitu RAMSI melakukan pembangunan kapasitas di bidang hukum, politik, keamanan, dan ekonomi di Kepulauan Solomon.

## PENDAHULUAN

Di dalam internal sebuah negara, terdapat macam-macam dinamika yang terjadi, baik itu di dalam pemerintahan suatu negara, ekonomi, maupun sosial penduduknya dari negara tersebut. Salah satu dinamika yang terjadi dalam sebuah negara ialah konflik. Konflik dapat terjadi seperti terjadinya ketidakseimbangan ekonomi, sosial, dominasi dari para pendatang kepada penduduk lokal, dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan jumlah korban jiwa yang sangat besar.

Konflik yang terjadi di dalam suatu negara tersebut, yang awal permasalahannya bersifat internal, dapat sewaktu-waktu menjadi permasalahan yang berskala internasional dan dapat menjadi *transnational threats*, di mana adanya ancaman yang terjadi disuatu negara akibat dari masalah lingkungan, ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan isu-isu imigrasi dan untuk penanganan konflik ini tidak membutuhkan kekuatan militer, namun jika dibiarkan maka hal ini akan menimbulkan ancaman yang sangat luas terhadap negara sekitarnya baik itu kawasan maupun global (Snyder, 2012: 36).

Konflik yang berawal dari suatu negara, hingga dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas kawasan, contohnya pada konflik di Kepulauan Solomon di kawasan Asia Pasifik yang dimulai pada tahun 1999. Konflik Solomon berawal ketika datangnya penduduk kepulauan Malaita untuk bermigrasi ke kepulauan Guadalcanal. Sebelumnya, kepulauan Malaita yang merupakan kepulauan dengan tanah pertanian yang padat, penuh dengan investor swasta dan publik, mengakibatkan penduduk kepulauan Malaita untuk pindah ke Kepulauan Guadalcanal (Braithwaite et al., 2010: 18-19). Konflik ini

diakibatkan dari pembangunan tidak merata serta adanya kesenjangan sosial antara penduduk asli Guadalcanal dan pendatang dari Malaita.

Konflik ini dimulai ketika pemberontakan yang dilancarkan oleh pemuda Guadalcanal dengan keterlibatan aktif para pemimpin politik Guadalcanal seperti Ezekiel Alebua yang membentuk sebuah gerakan *Isatabu Freedom Movement (IFM)* yang sebelumnya bernama Tentara Revolusioner Guadalcanal (Allen & Dinnen, 2010: 305-306). Kelompok ini bertujuan untuk mengusir para pendatang Malaita dari Guadalcanal. Fase kedua yaitu pada akhir tahun 1999, dibentuklah *Malaita Eagle Force (MEF)* yang bertujuan untuk membela orang-orang Malaita dari serangan pemberontak Guadalcanal dan dalam operasi gabungan sayap paramiliter yang didominasi oleh orang-orang Malaita dan Kepolisian Kepulauan Solomon (Allen & Dinnen, 2010: 306), MEF secara efektif melakukan kudeta yang mengakibatkan pengunduran Perdana Menteri Bartholomew Ulufa'alu pada 5 Juni 2000. Di bulan Oktober 2000, ditandatangani gencatan senjata antara IFM dan MEF di Townsville, Australia, namun gencatan senjata tersebut tidak dipatuhi kedua belah pihak serta memunculkan perpecahan dari kedua kelompok tersebut untuk melakukan aksi kriminal bersenjata dengan melakukan aksi perampokan, intimidasi, dan segala aktivitas kriminal yang membuat ketidakamanan penduduk Solomon. Dalam perkelahian antara dua kelompok militan selama tahun 1998-2000, sekitar 200 orang tewas dan ribuan orang mengungsi (Peters, 2011: 90). Banyak penduduk melarikan diri dari Guadalcanal dan pulang ke kampung halaman di provinsi lain, termasuk sekitar 25.000 yang kembali ke

Malaita dan ribuan penduduk asli Guadalcanal juga melarikan diri dari ibukota Honiara ke pedalaman pulau yang lebih aman (Peters, 2011: 90).

Kemudian, perdana menteri serta parlemen Kepulauan Solomon meminta bantuan kepada dunia internasional, khususnya pada kawasan Pasifik untuk meredakan situasi di Solomon. *Pacific Islands Forum* (PIF) sendiri menerima permintaan bantuan Solomon dengan membentuk pasukan *Regional Assistance Mission to Solomon Islands* (RAMSI) untuk mengembalikan keadaan Kepulauan Solomon menjadi aman (Braithwaite et al., 2010: 22).

*Regional Assistance Mission to Solomon Islands* (RAMSI) dibentuk pada tanggal 24 Juli 2003 atas permintaan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sir Allan Kemakeza. RAMSI anggotanya berasal dari gabungan kepolisian dan masyarakat sipil dari negara-negara *Pacific Islands Forum* (PIF) seperti Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Samoa, Tonga dan Vanuatu, di mana kelompok ini dipimpin oleh Australia (Hameiri, 2012: 411-412). Pembentukan RAMSI berawal dari pertemuan para menteri luar negeri negara-negara PIF di Sydney untuk meratifikasi intervensi dibawah naungan PIF.

RAMSI membawa mandat dalam melakukan misinya dengan mengkombinasikan keamanan dan pembangunan di Solomon, dengan membawa esensi “*a state-building exercise*”, dengan mandat lebih luasnya yaitu (Dinnen & Allen, 2013: 227): menjamin keamanan di Kepulauan Solomon; memperbaiki dan mereformasi penggerak-penggerak dalam pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan, dan penyampaian pelayanan baik itu di daerah perkotaan dan provinsi; memperbaiki dan meningkatkan tata kelola ekonomi pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah; membantu membangun kembali ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan berbasis luas; dan membangun sebuah komunitas yang kuat dan damai (Dinnen & Allen, 2013: 229).

Adanya konflik di negara Kepulauan Solomon yang awalnya bersifat lokal, kemudian bisa menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara sekitarnya, khususnya di kawasan Pasifik. Selain itu, konflik ini juga mengancam stabilitas keamanan Pasifik. PIF sebagai bentuk institusi kawasan Pasifik, ditambah dengan pemerintah Solomon yang meminta bantuan kepada PIF, bertindak untuk menangani konflik ini agar tidak melebar dan menjadi ancaman lebih jauh terhadap negara-negara dan kawasan Pasifik. Maka, PIF membentuk RAMSI untuk meredakan dan menangani konflik tersebut agar tidak melebar dan menjadi ancaman bagi negara-negara dan kawasan Pasifik. Maka artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran RAMSI dalam menanggulangi terancamnya *human security* atau keamanan manusia di Kepulauan Solomon akibat konflik yang terjadi berdasarkan keterlibatannya sebagai bentuk *responsibility to protect*.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Keamanan Nontradisional

Dalam dunia internasional, keamanan nontradisional muncul saat berakhirnya Perang Dingin ketika masalah-masalah yang terjadi di suatu negara tidak dilihat dari ancaman yang terjadi bersifat militer saja, namun juga ancaman-ancaman yang bersifat nonmiliter (Singh & Nunes, 2013: 67). Ancaman nonmiliter ini bersifat transnasional di mana bisa mempengaruhi keadaan kepada politik, militer, ekonomi, dan sosial di mana memberikan dampak terhadap terancamnya internal suatu negara, baik itu pemerintahan maupun penduduk di dalamnya. Ancaman tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda namun memiliki karakteristik yang sama di mana ancaman ini menggunakan media teknologi, komunikasi, dan transportasi yang canggih serta aktor-aktor transnasional dan nonnegara terlibat di dalam ancaman tersebut (Mathew & Shambaugh, 1998: 163–175).

Dalam mengatasi ancaman nontradisional, pendekatan tradisional seperti aksi militer tidak bisa mengatasi ancaman tersebut yang

berkembang dalam bentuk baru. (Williams & Black, 1994: 127-151). Negara mengadopsi berbagai aturan untuk mengatasi ancaman nontradisional dan ketakutan terhadap ancaman keamanan seperti itu masih belum sempurna karena tantangan saat ini berkembang dalam bentuk baru dan di luar jangkauan kendali langsung negara (Singh & Nunes, 2016: 9).

RAMSI merupakan aktor nonnegara yang bergerak untuk menangani konflik di Kepulauan Solomon. RAMSI yang terdiri dari gabungan beberapa negara di kawasan Pasifik bertujuan mengembalikan kondisi Kepulauan Solomon menjadi kondusif akibat dari timbulnya konflik. Konflik ini bersifat terganggunya *human security* dari penduduk Kepulauan Solomon. Hal tersebut merupakan bagian dari dengan konsep keamanan nontradisional, di mana aktor yang meliputi tidak hanya sebatas negara dan isu yang terjadi tidak sebatas ancaman militeristik saja, namun adanya ancaman terhadap *human security* dari penduduk Kepulauan Solomon yang dapat mengancam kepada negara-negara lain.

### **Human Security (Keamanan Manusia)**

Konsep *human security* atau keamanan manusia bahwa objek rujukan utama keamanan bukanlah negara atau kelompok sub-negara tertentu, seperti bangsa tanpa kewarganegaraan, tetapi individu-individu yang menjadi dasar lembaga/kelompok ini. Falk, misalnya, menganggap bahwa keamanan harus didefinisikan sebagai “negasi rasa tidak aman karena secara khusus dialami oleh individu dan kelompok dalam situasi konkret” (Falk, 1995: 147).

Dengan mengadopsi kerangka kerja keamanan manusia, gagasan keamanan disusun kembali sebagai konstruksi sosial yang menghilangkan kebutuhan para analis untuk berspekulasi tentang apa yang mereka anggap paling mengancam dari berbagai masalah dalam agenda politik internasional kontemporer dan lebih berkonsentrasi pada menganalisis bagaimana dan mengapa isu-isu

tertentu sebenarnya dianggap penting dan ditanggapi secara luar biasa oleh para pembuat keputusan. Pendekatan ini tepat karena terbukti, melalui jajak pendapat, bahwa orang-orang memikirkan keamanan mereka dalam istilah yang berbeda saat ini daripada yang mereka lakukan selama Perang Dingin. Juga dapat diamati dengan berbagai cara bahwa agenda politik internasional telah menjadi jauh lebih beragam sejak tahun 1990 dengan pemerintah-pemerintah yang memberikan prioritas lebih besar pada isu-isu seperti ancaman lingkungan, obat-obatan dan kesehatan masyarakat. Bahkan organisasi militer secara eksplisit, seperti NATO, semakin berfokus pada kegiatan nonmiliter (Hough, 2008: 10-11).

Kemudian pada tahun 1990-an, PBB mengembangkan konsep keamanan manusia. Konsep keamanan harus berubah, dari tekanan eksklusif pada keamanan nasional ke tekanan yang jauh lebih besar pada keamanan masyarakat, dari keamanan melalui persenjataan ke keamanan melalui pengembangan manusia, dari teritorial ke makanan, pekerjaan dan keamanan lingkungan (UNDP, 1993: 2). Sebelumnya, artikulasi pertama keamanan manusia dalam politik internasional datang dua tahun sebelumnya pada Konferensi Pan Afrika yang disponsori oleh PBB dan Organisasi untuk Kesatuan Afrika. Konsep keamanan melampaui pertimbangan militer. Hal tersebut harus ditafsirkan dalam hal keamanan warga negara individu untuk hidup dalam damai dengan akses ke kebutuhan dasar kehidupan sementara sepenuhnya berpartisipasi dalam urusan atau masyarakatnya dalam kebebasan dan menikmati semua hak asasi manusia yang mendasar (Hough, 2008: 14).

Keamanan manusia digolongkan kepada keamanan nontradisional, di mana keamanan nontradisional tidak berfokus kepada negara (*state-centered*) saja seperti pada keamanan tradisional, tetapi kepada manusia itu sendiri (*people-centered*) yang mana permasalahan keamanan tidak lagi menjadi sebuah konsep

yang dibentuk oleh negara dan titik fokusnya bukan negara lagi, melainkan dikembalikan kepada hakikat manusia yang membutuhkan rasa aman dari segala hal, baik dari ancaman dari luar diri manusia maupun di dalamnya (Effendi, 2008: 3). Aspek-aspek dari keamanan manusia mencakup seperti *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security* (UNTFHS, 2009: 6). Jika salah satu aspek tersebut terganggu, maka keamanan manusia seseorang juga terganggu.

Maka, dengan adanya konflik di Kepulauan Solomon adalah bentuk terganggunya keamanan manusia masyarakatnya. Ketika hal ini telah mulai terancam, maka diperlukan *responsibility to protect* (R2P) atau tanggung jawab untuk melindungi dalam mengatasi permasalahan tersebut. RAMSI sebagai bentuk aktor nonnegara melakukan R2P untuk mengatasi konflik di Kepulauan Solomon.

### **Responsibility to Protect (R2P)**

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) yang dibentuk oleh pemerintah Kanada mengeluarkan laporannya pada tahun 2001 tentang R2P (ICISS, 2001). R2P sebagai gagasan didasarkan pada gagasan kedaulatan sebagai tanggung jawab. Dalam pengertian ini, negara berdaulat dipandang bertanggung jawab atas perlindungan warganya. Jika gagal untuk menghormati tanggung jawab ini, maka masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk bereaksi (Erdogan, 2017: 35). R2P bersifat multidimensi dan berlapis-lapis. Ini mencakup langkah-langkah seperti langkah-langkah yang tidak terlalu memaksa (diplomasi, sanksi), dan menjadi rangkaian kesatuan yang mencakup kebijakan seperti pencegahan dan peringatan dini. Intervensi militer tidak istimewa dan dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua jalan lain habis. R2P juga melibatkan gagasan pembangunan kembali dan akuntabilitas (sebelum hukum pidana internasional) setelah intervensi (Erdogan, 2017: 35).

Doktrin R2P dengan suara bulat diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005. Dewan Keamanan menyebutnya beberapa kali sejak itu, yang pertama pada tahun 2006 dengan Resolusi 1674. Pada tahun 2008, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, memperkenalkan tiga pilar R2P sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari empat kejahatan besar (Pilar 1), komitmen komunitas internasional untuk bantuan dan pembangunan kapasitas di negara-negara lain (Pilar 2), dan akhirnya tanggung jawab untuk waktu yang tepat dan respon tegas oleh komunitas internasional jika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab ini (Pilar 3) (Erdogan, 2017: 35).

Para pendukung R2P setuju bahwa dunia adalah tempat yang lebih saling bergantung dan kedaulatan negara yang absolut adalah konsep yang tidak sesuai dengan zaman. Rezim bertindak sebagai pemimpin utama dan tidak perlu dipertanyakan atas populasi mereka harus diteliti. Tindakan pemerintah yang membahayakan rakyatnya tidak boleh bebas dari kritik dan akuntabilitas internal dan internasional. Berbeda dengan tahun-tahun Perang Dingin, dunia saat ini memiliki banyak institusi dan mekanisme untuk melindungi orang-orang juga dari tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah dari pemerintah mereka sendiri. R2P adalah salah satu mekanisme terbaik dimiliki untuk melindungi orang dari kejahatan massal (Erdogan, 2017: 36).

Dalam ICSS, R2P terdapat 3 elemen, yaitu (ICISS, 2001, dalam Bellamy, 2009: 16-20):

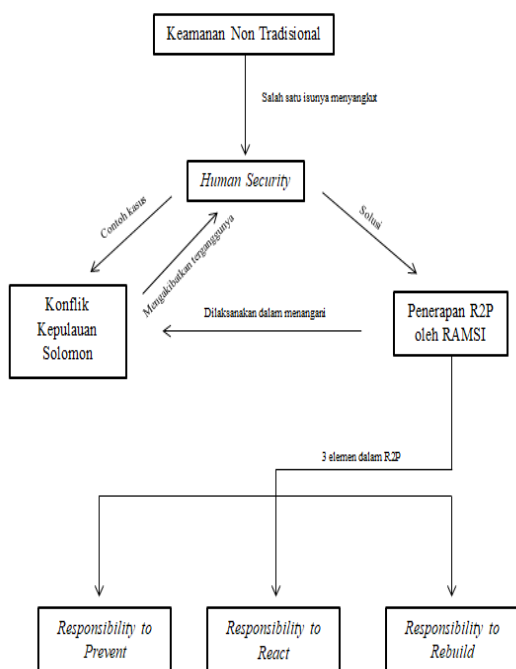
1. Tanggung jawab untuk mencegah (*responsibility to prevent*), merupakan tanggung jawab untuk menyikapi akar penyebab dan penyebab-penyebab langsung dari konflik internal serta krisis yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang mengakibatkan resiko terhadap populasi.
2. Tanggung jawab untuk bereaksi (*responsibility to react*), merupakan tanggung jawab untuk merespons situasi-situasi yang memaksa

dilakukannya langkah-langkah yang tepat demi kepentingan kemanusiaan, yang dapat berupa upaya paksa seperti sanksi-sanksi dan penuntutan internasional, dan dalam kasus yang ekstrim dapat berupa intervensi militer ataupun aksi-aksi lain dalam pencegahan terhadap konflik.

3. Tanggung jawab untuk pemulihan (*responsibility to rebuild*), merupakan tanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi yang dilakukan setelah intervensi militer ataupun aksi-aksi lain dalam pencegahan terhadap konflik.

Apa yang dilakukan oleh RAMSI ialah sebagai bentuk R2P dalam menangani konflik di Kepulauan Solomon. R2P RAMSI dilihat dari 3 elemen R2P sendiri, yaitu tanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi, dan tanggung jawab untuk pemulihan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1. Tiga Elemen R2P**



Sumber: Singh & Nunes, 2013; Mathew & Shambaugh; Williams & Black, 1994; Singh & Nunes, 2016; Falk, 1995; Hough, 2008; UNDP, 1993; UNTFHS, 2016; ICISS, 2001; Erdogan, 2017; Bellamy, 2009. Diolah kembali oleh penulis.

## METODE RISET

Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, di mana bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi (Nassaji, 2015: 129). Penggambaran fenomena beserta karakteristiknya dideskripsikan terlebih dahulu kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep-konsep yang digunakan. Kemudian memunculkan validitas deskriptif mengacu pada penggunaan aspek faktual data yang akurat, benar, dan tepat. Ini terutama terkait dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan peristiwa fisik dan perilaku yang, pada prinsipnya dapat diamati (Maxwell, 1992: 281-282).

Fenomena yang digambarkan dalam artikel ini ialah penanganan konflik Kepulauan Solomon oleh RAMSI. Penanganan konflik ini sebagai bentuk R2P dari RAMSI akibat terancamnya *human security* di Kepulauan Solomon. Penanganan ini juga berdasarkan 3 elemen dari R2P di mana kemudian fenomena penanganan konflik RAMSI dapat diamati sehingga nantinya dideskripsikan fenomena yang terjadi dan dianalisis menggunakan teori dan konsep-konsep yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Sehingga kemudian memunculkan jawaban atas pertanyaan penelitian lewat penggunaan jenis penelitian deskripsi analitis tersebut. Untuk batasan penelitiannya sendiri yaitu berlangsung pada 2003 ketika masuknya RAMSI ke Kepulauan Solomon hingga 2013 saat misi RAMSI mulai diperkecil karena situasi di Kepulauan Solomon telah mulai kondusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Kedatangan RAMSI di Kepulauan Solomon adalah bentuk penanganan terhadap terganggunya *human security* dari masyarakat

Kepulauan Solomon. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan, bahwa *human security* masyarakat Kepulauan Solomon terganggu akibat konflik internal di dalamnya yang menimbulkan korban jiwa. Karena pemerintahan Kepulauan Solomon tidak bisa menangani konflik internalnya sendiri, maka meminta bantuan kepada organisasi regional di Pasifik yaitu PIF untuk membantu penanganan konflik tersebut. Hal ini diwujudkan lewat pembentukan RAMSI dalam menangani konflik di Kepulauan Solomon.

Kedatangan RAMSI juga membawa misi penyelamatan terhadap Kepulauan Solomon. Misi penyelamatan ini diuraikan dalam beberapa fase dari aksi RAMSI, yaitu (SIG/RAMSI 2017: 27–28):

1. Intervensi dan stabilisasi (2003–2004): hukum dan ketertiban dipulihkan dengan cepat dan keuangan pemerintah distabilkan.
2. Penguatan kelembagaan (2004–2005): Prioritas RAMSI saat ini adalah membangun kembali aturan hukum, mengembalikan integritas pada keuangan pemerintah, reformasi penjara dan mengadakan persidangan terkait konflik yang terjadi.
3. Pengembangan kapasitas di tengah gejolak politik (2006–2008): RAMSI berkonsentrasi pada penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas dengan latar belakang kemunduran besar dalam hubungan bilateral antara Honiara dan Canberra (berkaitan dengan penembakkan terhadap polisi Australia saat berpatroli di Honiara, Kepulauan Solomon).
4. Menguatkan kembali kemitraan menuju Transisi RAMSI (2009–2013): Kerangka Kerja Kemitraan 2009–2013 dirancang untuk memperkuat kemitraan kerja sama antara misi dan pemerintah Kepulauan Solomon dan memajukan upaya pengembangan kapasitas RAMSI.
5. Pengembangan dan penarikan polisi (2013–2017): Kontingen militer RAMSI

yang tersisa ditinggalkan pada 2013 dan program pembangunan utama dialihkan ke mitra pembangunan bilateral.

Dengan fase-fase tersebut, menunjukkan bentuk dan aksi apa saja yang dilakukan RAMSI di Kepulauan Solomon dalam penanganan konflik. Pada penelitian ini kemudian menjabarkan bentuk dan aksi dari RAMSI dalam penanganan konflik di Kepulauan Solomon berdasarkan kerangka R2P, di mana kerangka ini sebagai bentuk solusi yang dihadirkan oleh RAMSI untuk menangani konflik ini. Kerangka-kerangka dari R2P yang digunakan RAMSI di Kepulauan Solomon dijabarkan dibawah ini.

### **Tanggung Jawab untuk Mencegah (*Responsibility to Prevent*)**

Awal pembentukan RAMSI ialah sebagai bentuk respons penyebab terjadinya konflik di Solomon. RAMSI lahir dari Deklarasi Biketawa pada tahun 2001 (Fraenkel, 2015: 403). Deklarasi ini dibentuk oleh PIF untuk mencegah dan menangani konflik Solomon, di mana salah satu nilai deklarasi tersebut yaitu komitmen untuk pengentasan ancaman terhadap keamanan dan komitmen untuk mencegah dan mengatasi konflik (*Biketawa Declaration*, 2001). Landasan yang dikeluarkan PIF ini menjadi landasan bagi RAMSI kedepannya untuk melakukan tindakan intervensi dalam mencegah dan menanggulangi konflik di Kepulauan Solomon.

Kemudian mandat RAMSI untuk beroperasi di Kepulauan Solomon disepakati antara pemerintah Kepulauan Solomon dan negara-negara PIF. Mereka berusaha untuk mencegah dan mengatasi tantangan luar biasa yang dihadapi Kepulauan Solomon, termasuk kerusuhan sipil dan pelanggaran hukum, penurunan ekonomi dan stagnasi, dan penurunan dramatis dalam standar pemerintah. Mandat tersebut diuraikan dalam Kerangka Kerja untuk Penguatan Bantuan untuk Kepulauan Solomon: Ruang Lingkup dan Persyaratan yang Diusulkan, yang disahkan

oleh kabinet dan parlemen Kepulauan Solomon. Di bawah kerangka kerja, mandat RAMSI adalah untuk (Putt et al., 2018: 23):

1. Mengembalikan ketertiban sipil di Honiara dan di seluruh bagian negara itu, termasuk menyita senjata ilegal, menginvestigasi dan mengadili pelanggaran pidana baru, memperkuat pengadilan dan sistem penjara dan melindungi kementerian-kementerian utama pemerintah.
2. Menstabilkan keuangan pemerintah, termasuk mengamankan pengumpulan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran, memperkuat perlindungan administrasi keuangan dan mendapatkan dukungan donor dan lembaga keuangan internasional.
3. Mempromosikan pemulihan ekonomi jangka panjang dan menghidupkan kembali kepercayaan bisnis, termasuk menerapkan reformasi ekonomi, menangani korupsi dan meningkatkan manajemen utang.
4. Membangun kembali struktur-struktur pemerintahan, termasuk berfungsinya parlemen nasional, kabinet, pelayanan publik dan proses pemilihan.

Mandat RAMSI seputar keamanan dan pemeliharaan hukum serta ketertiban juga diatur dalam Pasal 2 Perjanjian RAMSI, yang menyatakan (Putt et al., 2018: 23-24):

Negara-negara Pembantu dapat mengerahkan kontingen pasukan polisi, angkatan bersenjata dan personil lainnya ke Kepulauan Solomon untuk membantu dalam penyediaan keamanan dan keselamatan bagi orang-orang dan properti; memelihara persediaan dan layanan yang penting bagi kehidupan komunitas Kepulauan Solomon; mencegah dan menekan kekerasan, intimidasi dan kejahatan; mendukung dan mengembangkan institusi Kepulauan Solomon; dan umumnya membantu dalam pemeliharaan hukum dan ketertiban di Kepulauan Solomon.

Selain itu, kehadiran RAMSI di Kepulauan Solomon juga berkaitan dengan pencegahan dan penanganan konflik, di mana hal ini sesuai dengan salah satu fase dari kegiatan RAMSI di Kepulauan Solomon yaitu, intervensi dan stabilisasi (2003–2004). Pada fase ini hukum dan ketertiban dipulihkan dengan cepat dan keuangan pemerintah distabilkan. Fase ini termasuk penyerahan sebagian besar senjata dan penangkapan para pemimpin militan. Layanan pemerintah dimulai kembali ketika pegawai negeri mulai dibayar kembali, dan penguatan kelembagaan dimulai dengan polisi, pengadilan dan penjara, serta lembaga pemerintah pusat utama termasuk Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan (SIG/RAMSI 2017: 27–28).

Kehadiran RAMSI di Honiara misalnya, sejak 2003 telah memberikan bantuan kekuatan fisik yang telah membantu mengurangi kekerasan di pusat kota, serta berkontribusi besar pada pembaruan, pelatihan, dan peningkatan profesionalisme RSIPF. Keamanan yang diberikan oleh RAMSI juga telah memfasilitasi pengembalian masuknya migran ke Honiara setelah jeda selama pemberontakan sipil (Droogan & Waldek, 2015: 299).

RAMSI melakukan penanganan konflik di Kepulauan Solomon sebagai bentuk pencegahan Kepulauan Solomon menjadi *failed state*. Tahap-tahap pencegahannya ini adalah jangka pendek (preventif) dan jangka panjang (rekonstruktif). Pencegahan ini kemudian evaluasinya tentang efektivitas misi RAMSI di mana unti dari evaluasi menimbulkan pertanyaan apakah RAMSI berhasil mengatasi ketidakstabilan di Kepulauan dan di wilayah tersebut (di mana Kepulauan dapat dilihat sebagai resiko keamanan terbesar) (Tökölyová, 2012: 48). Titik utamanya adalah bahwa klasifikasi Kepulauan Solomon sebagai negara gagal adalah benar. Penanganan RAMSI terhadap konflik Kepulauan Solomon bahwa RAMSI telah memenuhi tujuan pencegahannya dan dengan demikian dapat dikatakan efektif dari



aspek tujuan jangka pendek (tujuan preventif) (Tökölyová, 2012: 48).

### **Tanggung Jawab untuk Bereaksi (Responsibility to React)**

Dalam menjalankan tanggung jawab ini, RAMSI melakukan tindakan untuk menanggulangi konflik Solomon. Pada Juli 2003, RAMSI mengirim lebih dari 2.200 personel angkatan bersenjata, polisi dan pegawai negeri ke Kepulauan Solomon. Pasukan RAMSI memulihkan perdamaian ke Honiara dan bagian-bagian tetangga Guadalcanal (Moore, 2018: 171). Pada akhir 2003, 3700 senjata telah diserahkan; kebanyakan dari senjata ini dihancurkan dan dikubur di bukit berumput taman bermain seberang Markas Polisi *Rove*. Meskipun beberapa senjata berkekuatan tinggi lolos dari penjarangan ini dan masih terkubur di sekitar Honiara dan di Malaita, penyerahan senjata dan amunisi itu sebagian besar berhasil dan membuat Kepulauan Solomon sekali lagi bebas senjata. Alex Bartlett, mantan pemimpin *Malaita Eagle Force* (MEF) dan kemudian Menteri Pariwisata, menyerahkan beberapa senapan, dua revolver, dan ribuan amunisi. Lebih dari setengah dari pasukan ditarik pada akhir tahun 2003, dan yang lainnya pergi pada bulan Februari dan Maret 2004, meninggalkan sekitar 200 polisi asing, beberapa personel angkatan bersenjata dan pegawai negeri senior di Kepulauan Solomon (Moore, 2018: 171).

Beberapa *kwaso* ilegal (alkohol) masih ditutup, para penjahat mulai takut ditangkap dan kehidupan jalanan di ibukota kembali normal. Penduduk Honiara memiliki beban yang diangkat dari pundak mereka; sekarang dimungkinkan untuk bergerak dengan bebas dan menikmati kegiatan rekreasi di pinggiran kota. Selama 1998-2003, ketakutan dan keputusan mendominasi sikap di Honiara. Setelah pasukan dan polisi tiba, senyum menggantikan pandangan tertunduk dan muncul perasaan optimisme. Sementara banyak pelaku korupsi dan ilegal meninggalkan Honiara, membawa uangnya bersama mereka, dengan harapan mereka

dapat menghindari deteksi, tetapi RAMSI telah berupaya membawa mereka kembali ke pengadilan. Ekonomi Honiara mulai meningkat pada akhir 2003, meskipun bisnis ritel masih lamban dan satu-satunya perbaikan langsung adalah di bisnis yang memasok pemerintah atau organisasi donor bantuan, yang uangnya mengalir dengan lancar (Moore, 2005: 58).

Kemudian RAMSI secara sistematis mengejar tokoh-tokoh korup dan kriminal utama. Banyak militan kunci menghadapi persidangan, meskipun pelaku utama kerusuhan tidak pernah diadili. Pada November 2003, lebih dari 80 polisi telah didakwa, termasuk petugas senior. Anggota dewan tertinggi MEF, beberapa pemimpin IFM dan beberapa politisi (termasuk dua mantan perdana menteri, Yehezkiel Alebua dan Sir Alan Kemakeza) menjalani hukuman penjara karena berbagai kejahatan. Kehadiran militer lebih jelas dalam beberapa tahun pertama ketika personel bersenjata berpatroli di jalan-jalan Honiara dengan membawa senjata berkekuatan tinggi (Moore, 2018: 171). Pada tahun 2010-an, kekuatan militer terbatas pada barak dan kurang terlihat. Dengan dikumpulkannya senjata, fase kedua dan ketiga RAMSI melibatkan rehabilitasi kelembagaan dan ekonomi. Kehadiran RAMSI dan organisasi bantuan lainnya meningkatkan harga properti sewaan, dan Honiara memperoleh lebih banyak penggerak empat roda kelas atas, menambah lalu lintas yang semakin memburuk (Moore, 2007: 169-196).

Reaksi pemulihan RAMSI juga mendapatkan dampak terhadap penduduk Kepulauan Solomon. Hal ini dibuktikan pada sebuah survei opini publik yang dilakukan di Kepulauan Solomon oleh Solomon Islands Development Trust (SIDT), yang telah melakukan survei rutin terhadap penduduk kota dan desa selama beberapa tahun terakhir. Survei sebelum RAMSI menunjukkan bahwa dalam empat kategori survei, yaitu kesehatan, pendidikan, bantuan sumber daya, dan ketersediaan uang, dan hasilnya tidak ada satu pun yang mendapat skor lebih dari 42 persen

(Moore, 2005: 59). Orang-orang memberi isyarat bahwa mereka sudah menyerah mengharapkan sesuatu dari pemerintah mereka. Sebuah survei baru pada bulan Februari 2004 (dari 2.341 responden kota dan desa) memberi nilai tinggi RAMSI (88 persen) untuk memulihkan keamanan, dan skor yang sedikit lebih rendah (74 persen) untuk keberhasilan sistem peradilan. RAMSI meraih 66 persen untuk pemberian layanan (pendidikan, klinik, transportasi, pekerjaan, dan lain-lain) Dan 64 persen untuk pemulihan ekonomi nasional (Moore, 2005: 59).

### **Tanggung Jawab untuk Pemulihan (Responsibility to Rebuild)**

Setelah RAMSI berhasil membuat keadaan Solomon kembali kondusif, RAMSI dengan bantuan dari pihak kepolisian Solomon kembali membangun hukum dan keadilan yang telah ditegakkan, pemerintahan yang awalnya berhenti dan sistemnya rusak kembali dalam proses perbaikan, dan bantuan yang cukup besar dari RAMSI, keuangan negara kembali tumbuh dan banyak hutang negara yang telah terbayarkan. Reformasi dibidang telekomunikasi, manajemen keuangan publik yang dilihat sebagai bentuk peningkatan layanan (Coppel, 2012: 4).

Di bawah agenda untuk mereformasi aparatur negara, RAMSI melakukan pemulihan di Kepulauan Solomon dengan sejumlah besar bantuan pembangunan digunakan untuk membangun kembali alat-alat pemerintah, yang dikenal sebagai pendekatan “Tiga Pilar” yaitu untuk restrukturisasi polisi, institusional yang akuntabel, dan reformasi ekonomi (Moore, 2018: 172).

Untuk restrukturisasi polisi, RAMSI diberi mandat untuk bekerja sama dengan Komisaris Polisi untuk mereformasi Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF), merupakan mitra penting dalam memulihkan keamanan dan dipahami dengan baik bahwa jajarannya berisi banyak individu yang telah terlibat dalam tindakan korupsi, intimidasi, dan kekerasan kriminal yang serius. Hal ini juga

dilakukan lewat pengenalan personil polisi asing ke posisi-posisi yang sejalan, dan menyediakan sumber daya yang meningkat (National Parliament of Solomon Islands, 2009: 22).

Dukungan kepolisian yang disediakan oleh RAMSI juga telah mengalami transisi selama beberapa waktu. Polisi RAMSI telah mundur dari kepolisian sehari-hari. Antara Agustus 2011 dan Mei 2012, mereka menarik diri dari sepuluh pos polisi provinsi dan sekarang terkonsentrasi di Honiara dengan kehadiran di Auki (Provinsi Malaita), Gizo (Provinsi Barat) dan Lofung (Pulau Shortland, Provinsi Barat). Di Honiara, mereka tidak lagi berpatroli di jalan-jalan atau menanggapi permintaan bantuan dan hal ini diserahkan tugasnya kepada Kepolisian Kepulauan Solomon. Sebaliknya, peran polisi RAMSI adalah untuk melatih RSIPF dan memberikan dukungan kepada kepemimpinan seniornya. Polisi RAMSI juga menjaga kemampuan manajemen ketertiban umum dan RSIPF dapat dilibatkan dalam pengelolaan insiden besar jika diperlukan (Coppel, 2012: 12).

Polisi RAMSI terus mendukung pos polisi provinsi melalui penyediaan program kepemimpinan dan bimbingan, komunikasi dan dukungan logistik, dan perbaikan stasiun. RAMSI sekarang fokus pada pengembangan kemampuan RSIPF, terutama dalam pengembangan kepemimpinan, manajemen ketertiban umum dan logistik penting, sumber daya manusia dan fungsi administrasi yang diperlukan untuk mendukung pejabat garis depan RSIPF. Strategi transisi ini dikembangkan bersama oleh RAMSI dan RSIPF, dan disepakati pada November 2011 (Coppel, 2012 12).

Kemudian dalam institusional yang akuntabel, RAMSI bergerak melakukan pemulihan lewat memfasilitasi penyebaran pegawai negeri sipil ke peradilan (baik Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Rendah), Kantor Direktur Penuntutan Publik dan Kantor Pengacara Publik. Kegiatan konstruksi yang luas terjadi kemudian dalam dekade ini, yang

melibatkan pengadilan dan akomodasi baru atau yang telah diperbaharui di Honiara dan pusat-pusat provinsi. Fokus awal kunci dari kegiatan ini adalah melihat melalui uji coba pada ketegangan yang terjadi. Sejak 2009, jumlah penasihat eksternal dan personel di lini sektor ini sangat diperkecil (Frankel, 2015: 406-407).

RAMSI juga membangun kembali *machinery of government* (MOG) atau komponen-komponen penting pemerintah di mana pada masa-masa awal digambarkan oleh koordinator khusus sebagai pusat tujuan “pembangunan bangsa” RAMSI (Fraenkel, 2015: 407), 2004). Ini dimulai setelah program-program lain dan termasuk bantuan kepada lembaga-lembaga akuntabilitas utama, seperti Kantor Auditor Jenderal, Komisi Pemilihan Umum dan Layanan Dukungan Parlemen, serta kantor ombudsman dan Komisi Kode Kepemimpinan (Allen & Dinnen, 2015: 390). Di bawah kepemimpinan Sir Peter Kenilorea dan Panitera Taesi Sanga, Layanan Pendukung Parlemen berubah secara dramatis, seperti halnya Kantor Auditor Jenderal di bawah Floyd Augustine Fatai, tetapi MOG akhirnya menjadi hamparan berbagai program yang terhubung secara longgar, yang dengan antusiasme domestik dan internasional semakin berkurang (Fraenkel, 2015: 407-408).

Dalam praktiknya, RAMSI menghindari membantu atau mendorong pembentukan kembali lembaga negara yang mendasar, misalnya dengan menulis ulang konstitusi atau mendesain ulang sistem pemilihan. Pemerintah Kepulauan Solomon telah berkomitmen untuk memperkenalkan konstitusi federal pada Perjanjian Perdamaian Townsville pada tahun 2000, dan konsultasi ekstensif mengenai desentralisasi telah berlangsung selama tahun 2002–03, tetapi RAMSI mengambil posisi oposisi yang tenang namun efektif terhadap usulan reformasi konstitusi (Roy, 2013: 209-210). Di lapangan, banyak personel RAMSI tertarik pada reformasi pemilihan umum dan menyaksikan pengenalan pemilihan

preferensial atau penguatan partai (Roy, 2013: 212).

Dalam reformasi ekonomi, penyebaran penting adalah ke Kementerian Keuangan, dengan ekspatriat mengambil posisi kuat seperti akuntan jenderal, wakil menteri keuangan dan komisaris pendapatan dalam negeri. RAMSI membantu lewat pelunasan utang untuk menstabilkan keuangan pemerintah. Upaya terpadu yang diarahkan pada kepatuhan pajak dan bea cukai menyebabkan peningkatan substansial dalam pendapatan pemerintah. Ini adalah pembangunan negara klasik, setidaknya untuk aliran pemikiran yang melihat akuisisi negara atas penerimaan pajak sebagai pusat penciptaan lembaga akuntabilitas yang kuat, tetapi ekonom dan akuntan RAMSI memiliki kontrol yang jauh lebih sedikit terhadap pengeluaran pemerintah (Moore, 2007: 13). Sebagai contoh, selama 2006–2007, RAMSI hanya memiliki satu pejabat yang ditugaskan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Koordinasi Bantuan, yang memiliki tanggung jawab untuk sebagian besar pengeluaran rekening modal dan pada saat itu termasuk pengawasan hibah kontroversial yang dikirimkan ke Anggota parlemen dalam bentuk dana pembangunan konstitusi pedesaan yang didanai bantuan Taiwan (Coventry, 2009: 7). Sebagai reaksi terhadap ini dan pengaruh politik domestik lainnya terhadap pengeluaran pemerintah, Australia, Selandia Baru dan organisasi multilateral berusaha untuk melindungi setidaknya dana donor agar tidak dialihkan untuk tujuan politik domestik (Craig & Porter, 2013: 12-13).

Fokus utama RAMSI adalah memulihkan ketertiban keuangan pemerintah. Sejak kedatangan RAMSI, telah ada reformasi yang luas untuk prosedur dan praktik di Kementerian Keuangan, termasuk Pendapatan Darat dan Bea Cukai, yang sering dilakukan oleh personel atau penasihat RAMSI bekerja sama dengan pegawai negeri sipil Kepulauan Solomon. Tujuh belas pejabat pemerintah luar negeri dikerahkan sebagai bagian dari Tim Stabilisasi Anggaran awal RAMSI termasuk

dalam posisi lini seperti Wakil Menteri Keuangan dan Akuntan Jenderal. Sebanyak 10 Juta Australia Dollar dimasukkan ke dalam anggaran 2004-2005 untuk membuat “roda” perdagangan bergerak. Rekening pemerintah diselidiki dan kontrol atas pengeluaran secara bertahap membaik. Sistem baru diberlakukan, dan daftar gaji dibersihkan. Pada akhir 2013, masih ada 25 penasihat asing yang membantu staf secara keseluruhan di Kementerian Keuangan tahun 2001 (Fraenkel, Mandraiwiwi, & Okole, 2014: 63-64).

Unit Reformasi Ekonomi, awalnya didirikan pada tahun 2004, membawa lima penasihat RAMSI bersama dengan lima staf RAMSI, untuk memberikan saran kebijakan kepada pemerintah tentang cara-cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan. Ini juga menyediakan tautan ke lembaga multinasional, dan memainkan peran kunci dalam menghasilkan undang-undang. Sebagai contoh, mereka memainkan peran sentral dalam mengubah peraturan investasi asing, dan juga meletakkan jalan bagi pengaktifan kembali tambang *Gold Ridge* di pusat Guadalcanal dan dimulainya kembali operasi minyak sawit di dataran utara di bawah Dataran Guadalcanal milik Malaysia yang dimiliki *Malaysia Palm Oil Ltd* (GPPOL). Pada 2012, Unit Reformasi Ekonomi memiliki lima staf tetap, enam lulusan di bawah program RAMSI dan lima penasihat RAMSI (Fraenkel, Mandraiwiwi, & Okole, 2014: 67).

## **KESIMPULAN**

Konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon menjadi krisis kemanusiaan ketika terjadinya kekacauan di Solomon, mengakibatkan terancamnya nyawa penduduk Solomon akibat konflik internal yang terjadi. Solomon, dengan pemerintahannya selanjutnya tidak mampu untuk menyelesaikan konflik ini dan membuat komunitas internasional, seperti RAMSI untuk bereaksi terhadap konflik ini. RAMSI yang melakukan kebijakan *responsibility to protect* di Kepulauan Solomon untuk menyelamatkan

Kepulauan Solomon dari kekacauan yang ditimbulkan dalam internalnya agar nantinya konflik ini tidak menyebar ke negara dan kawasan di Pasifik, serta membawa keadaan Solomon kembali kondusif dengan menerapkan program-program yang telah dibentuk sebelumnya.

Dengan aksi RAMSI tersebut, kemudian berdampak pada peningkatan kapasitas di Kepulauan Solomon. Pada November 2011, Kabinet Kepulauan Solomon beserta PIF menghendaki RAMSI harus “bertransisi”, di mana keadaan Kepulauan Solomon yang sudah aman dan kondusif, RAMSI perannya diperkecil untuk semata-mata misi pemolisian, yang berfokus pada penguatan kapasitas kepolisian Solomon, karena pembangunan di Solomon sendiri sudah pesat dan sudah tidak membutuhkan bantuan RAMSI dalam bidang pembangunan negara (Barbara, 2014: 398-401).

Pada hari-hari terakhir RAMSI, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare juga menjelaskan bahwa ia merasa bahwa RAMSI telah melaksanakan mandatnya dengan baik, dan bahwa pemerintahnya tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi komisi RAMSI, dengan kerangka perbaikan yang berlaku. Pelajaran telah dipelajari, dan, meskipun ada beberapa konflik-konflik kecil, namun telah diselesaikan dengan baik. Seperti yang diakui oleh beberapa peserta dalam simposium RAMSI akhir, kesalahan dibuat pada titik-titik penting. Ini diharapkan untuk intervensi internasional yang berani tanpa sesuatu yang bisa dijadikan contoh dan melibatkan sejumlah besar personil yang bekerja dalam situasi sulit selama bertahun-tahun. Melalui RAMSI, hubungan regional telah diperkuat dan negara-negara Pasifik telah disatukan bersama melalui tujuan bersama (Moore, 2018: 175).

Penting bagi Kepulauan Solomon bahwa RAMSI adalah operasi di seluruh Pasifik. Membawa negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya ke Kepulauan Solomon adalah bagian dari keberhasilan. Mereka menciptakan energi

budaya yang bergema diantara Kepulauan Solomon, yang menghargai bahwa Kepulauan Pasifik lain telah datang untuk membantu mereka memulihkan normalitas dan kemajuan. Keberhasilan tidak akan pernah terjadi tanpa komponen ini. Penduduk Kepulauan Solomon telah memulihkan kedamaian dan diberi kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri untuk memajukan bangsa mereka (Moore, 2018: 175).

Namun, kesuksesan RAMSI dalam menjalankan misi penyelamatan di Kepulauan Solomon juga menjadi pertanyaan, bagaimana kesuksesan mereka bisa menyelamatkan Kepulauan Solomon dari konflik, di mana jika dilihat dari fase kedatangan RAMSI dalam menangani konflik Kepulauan Solomon, untuk penanganan dan pencegahannya sendiri hanya dibutuhkan satu tahun yaitu pada tahun 2003-2004, selanjutnya peran RAMSI lebih banyak kepada penguatan, pemulihan, dan pembangunan stabilitas di Kepulauan Solomon. Walaupun terdapat beberapa konflik kecil di dalamnya, tetapi RAMSI berhasil kembali memulihkan kondisi di Kepulauan Solomon. Selain itu, bagaimana mayoritas masyarakat Kepulauan Solomon juga bisa menerima kehadiran RAMSI di negara mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M., & Dinnen, S. (2010). The North Down Under: Antinomies of Conflict and Intervention in Solomon Islands. *Conflict, Security & Development* 10 (3), 299–327.
- Allen, M., & Dinnen, S. (2015). Solomon Islands in Transition?. *Journal of Pacific History* 50 (4), 381-397.
- Barbara, J. (2014). From Intervention to Partnership—Prospects for Development Partnership in Solomon Islands after the RAMSI. *Asia & the Pacific Policy Studies* 1 (2), 395-408.
- Bellamy, A. J. 2009. *Responsibility to Protect*. Oxford: Polity Press.
- Braithwaite et al. (2010). *Pillars and Shadows: Statebuilding as Peacebuilding in Solomon Islands*. Canberra: ANU Press.
- Coppel, N. (2012). Transition of the Regional Assistance Mission to Solomon Islands—SSGM Discussion Paper 2012/10. *Canberra: State, Society and Governance in Melanesia program*, Australian National University, 1-19. Dipetik 19 Maret 2020 dari [http://pacificinstitute.anu.edu.au/outtrigger/wp-content/uploads/2013/02/SSGM\\_DP2012\\_101.pdf](http://pacificinstitute.anu.edu.au/outtrigger/wp-content/uploads/2013/02/SSGM_DP2012_101.pdf)
- Coventry, P. (2009). The Hidden Mechanics of Solomon Islands Budget Processes—Understanding Context to Inform Reforms. *Discussion Paper 2009/3*, State, Society and Governance in Melanesia. Research School of Pacific and Asian Studies. ANU College of Asia and the Pacific. Australian National University.
- Craig, D., & Porter, D. (2013). Political Settlement in Solomon Islands: a Political Economic Basis for Stability after RAMSI. *State, Society and Governance in Melanesia Program Working Paper* 1.
- Dinnen, S., & Allen, M. (2013). Paradoxes of Postcolonial Police-Building: Solomon Islands. *Policing & Society* 23 (2), 222-42.
- Droogan, J., & Waldek, L. (2015). Continuing Drivers of Violence in Honiara: Making Friends and Influencing People. *Australian Journal of International Affairs*, 69 (3), 285-304.
- Effendi, T. D. (2008). *Non Traditional Security dan Human Security dalam Praktik Demokrasi di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Erdogan, B. (2017). *Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect*. London: Palgrave Macmillan.
- Falk, R. (1995). *On Humane Governance. Toward a New Global Politics*, Cambridge: Polity Press.
- Fraenkel, J. (2015). The Teleology and Romance of State-building in Solomon

- Islands. *The Journal of Pacific History* 50 (4), 398-418.
- Fraenkel, J., Madraiwiwi, J., & Okole, H. (2014). The RAMSI Decade: A Review of the Regional Assistance Mission to Solomon Islands, 2003-2013. Dipetik 20 Maret 2020 dari <http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2014/July/Independent%20RAMSI%20Review%20Report%20Final.pdf>
- Hameiri, S. (2012). Mitigating the Risk to Primitive Accumulation: State-building and the Logging Boom in Solomon Islands. *Journal of Contemporary Asia* 42 (3), 405-426.
- Hough, P. (2008). *Understanding Global Security*. Edisi Kedua. New York: Routledge.
- ICISS Report. (2001). *The Responsibility to Protect*. Dipetik 18 Maret 2020 dari <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>
- Mathew, R. & G. Shambaugh. (1998). Sex, Drugs and Heavy Metals: Transnational Threats and National Vulnerabilities. *Security Dialogue* 29 (2), 163-175.
- Maxwell, J. A. (1992). Understanding and Validity in Qualitative Research. *Harvard Educational Review*, 62 (3), 279-300.
- Moore, C. (2005). The RAMSI Intervention in the Solomon Islands Crisis. *Journal of Pacific Studies*, 28 (1), 56-77.
- Moore, C. (2007) External Intervention: The Solomon Islands Beyond RAMSI. Dalam Brown, A. M. (Ed.), *Security and Development in the Pacific Islands: Social Resilience in Emerging States* (pp. 169-196). Boulder, CO: Lynn Rienner.
- Moore, C. (2018). The End of Regional Assistance Mission to Solomon Islands (2003-17). *The Journal of Pacific History*, 53 (2), 164-179.
- Moore, M. (2007) How Does Taxation Affect the Quality of Governance? *Working Paper Series*, 280. Brighton: IDS.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research* 19 (2), 129-132.
- National Parliament of Solomon Islands. (2009). Parliamentary Inquiry into the Facilitation of International Assistance Notice 2003 and RAMSI Intervention. *Foreign Relations Committee, National Parliament of Solomon Islands, Committee Report No. 1*, November. Honiara: National Parliament of Solomon Islands.
- Pacific Islands Forum Secretariat. (2001). *Biketawa Declaration*. Dipetik 18 Maret 2020 dari <http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Biketawa%20Declaration,%2028%20October%2020002.pdf>
- Peters, R. (2011). Kepulauan Solomon. Dalam Buchanan, C. (Ed), *Penciptaan Perdamaian di Asia dan Pasifik: Partisipasi, Perspektif dan Prioritas Perempuan* (pp. 88-97). Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.
- Putt et al. (2018). The RAMSI Legacy for Policing in the Pacific Region. *Research Report*, Australia National University.
- Roy, K. L. (2013). Participatory Constitution Making: Lessons from Fiji and Solomon Islands. *Dissertation*, University of Melbourne.
- Singh, N. K., & Nunes, W. (2013). Drug Trafficking and Narco-terrorism as Security Threats: A Study of India's North-east. *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 9 (1), 69-82.
- Singh, N. K., & Nunes, W. (2016). Nontraditional Security: Redefining State-centric Outlook. *Jadavpur Journal of International Relations* 20 (1), 1-23.
- Snyder, C. A. (2012). *Contemporary Security and Strategy*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Solomon Islands Government (SIG) & RAMSI. 2017. Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) 2003-2017. *A Joint Report by the Solomon Islands Government and RAMSI on the 14-year intervention*.

- Tökölyová, T. (2012). Solomon Islands as Failed State (Focused on Region's Security). *Journal of Geography, Politics and Society* 2 (2), 44-50.
- UNDP. (1993). *Human Development Report. People's Participation*. Oxford: Oxford University Press.
- UNTFHS. (2009). *Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. New York: Human Security Unit United Nations.
- Williams, P. & S. Black. (1994). Transnational Threats: During Trafficking and Weapons Proliferation. *Contemporary Security Policy* 15 (10), 127–151.